



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN RAPAT
DENGAR PENDAPAT DENGAN DIRUT MIND ID, DAN DIRUT PT.VALE
INDONESIA TBK**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 3 April 2024
Waktu : Pukul 15.04 WIB s.d.17.07 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H, M.H (F-PAN/Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos /Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit
Eselon I KESDM;
2. Perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale
Indonesia, Tbk menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Lain-lain
Hadir : 15 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI.
2. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

3. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H/F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

4 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
4. Ribka Tjiptaning Ploretariyati.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. Mukhtarudin.
3. Bambang Hermanto, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

0 orang anggota dari 5 anggota:

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI. Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

0 orang anggota dari 3 anggota:

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM)
2. Hendi Prio Santoso (Direktur Utama Mind-ID)
3. Wadirut PT Vale Indonesia

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Menteri, kita bisa mulai.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Menteri ESDM beserta jajarannya,
Yang kami hormati Direktur Utama Mind-ID beserta jajarannya,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Vale Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wadirut Vale Indonesia beserta jajarannya, serta
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita mampu bertemu untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu-Bapak Anggota Komisi VII dan para mitra dalam hal ini dalam acara Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke-4 Tahun Sidang 2023-2024, pada hari ini kami akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI dan RDP dengan Dirut Mind-ID dengan menghadirkan Direksi PT Vale Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda:

1. Optimalisasi *output* cadangan antar Unit Eselon I Kementerian ESDM;
2. Perpanjangan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia,
3. Dan lain-lain

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 15 anggota dari 7 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan telah terpenuhi dan sesuai ketentuan yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI agar rapat ini bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan Komisi VII, Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan mengucapkan "*bismillahirrahmanirrahim*" Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Mind-ID dan Dirut Vale Indonesia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.



**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.04 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII bahwa rapat ini selesai kurang lebih 2 jam setelah rapat kita mulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kita bersama, dapat disetujui ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, Ibu-Bapak yang kami hormati.

Pada tanggal 25 Maret 2024 Komisi VII DPR RI menerima surat dari Menteri ESDM RI, perihal permohonan persetujuan Komisi VII DPR RI atas RKAKL alokasi anggaran tahun anggaran 2024 Kementerian ESDM RI dalam rangka optimalisasi *output* cadangan antar unit Eselon 1 Kementerian ESDM RI untuk kegiatan:

- a. Pipa transmisi tahap 2 ruas batang Cirebon-Kandanghaur Timur pada Ditjen Migas,
- b. Tambahan bantuan pasang baru listrik BPBL pada Ditjen Ketenagalistrikan,
- c. Konversi motor BBM ke motor listrik dan PJUTS pada Dirjen EBTKE

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR RI meminta penjelasan dari Menteri ESDM RI, sehingga kami mendapatkan informasi yang menyeluruh sebelum membahasnya lebih lanjut.

Pada agenda selanjutnya.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Izin Ketua,

Tadi atas kesepakatan teman-teman dan semua poksi, mungkin agenda nomor 1 kita tiadakan aja, ya agenda nomor 1 kita *drop* ya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bagaimana, setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Sebentar Pak Pimpinan, terkait dengan masalah program-program yang 2023 yang belum tuntas ya. Terus terang *kan* sekarang *kan* masih menjadi hutang kami kepada rakyat, seperti PJUTS ya sudah disurvei tapi belum dipasang, masyarakat tiap hari tanya kapan dipasang ya dan kalau dilihat dari penjelasan yang sebelumnya bahwa masa 2023 udah selesai, tidak mungkin lagi dikerjakan. Sehingga ada 9.000 sekian secara nasional ini *kan* belum bisa dikerjakan, dituntaskan, ini *kan* jadi hutang kita juga kepada rakyat.

Solusinya kalau menurut Pak Menteri adalah anggaran perubahan yang akan kita bahas itu ya terkait dengan program PJUTS itu. *Nah* ini saya kira perlu kita pertimbangkan *gitu* ya karena kalau tidak ada di anggarkan yang sekarang, berarti PJUTS ini *kan* sudah tidak dilanjutkan begitu Pak Menteri, saya tanya.

Interaktif Pak Menteri, kalau misalnya anggaran yang ini kita *hold* misalnya tidak kita bahas dan 7 April harus diselesaikan, maka dia jadi bintang permanen katakanlah ya. Apakah PJUTS yang 9.000 itu ada solusi lain atau tidak ada lagi?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Ya ini memang kita memprogramkannya didalam anggaran yang akan dibahas pada siang hari ini, jadi kalau terlepas dari itu ini *nggak* ada lagi.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Artinya kalau ini tidak kita bahas berarti yang 9.000 unit yang belum tersambung artinya ya udah selesai tidak lagi bisa dilanjutkan, begitu Pak Menteri?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Ini misalnya nanti memang batas waktunya 7, tanggal 7 April ini ya kalau 7 April itu akan masuk bintang permanen.

F-GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Saya kira ini *kan* terus terang kayak saya sendiri juga ya *kan* masih beban *gitu* ya karena saya janjikan Pak, pasti terpasang cuma ini soal teknis aja, pasti terpasang, Pak Kades, apa semua. Sampai hari ini pun saya masih menjanjikan masih tetap dipasang *gitu* loh, tapi kalau sampai ternyata tidak bisa dipasang sama sekali gimana kita ini naruh muka kita ke rakyat *gitu* loh. Ini juga ada solusi lah seperti apalah ya, seperti apa, hutang kita ke rakyat juga terpenuhi dan kemudian persoalan juga bisa kita bicarakan *gitu* Pak Menteri.

Saya kira Pak Ketua, soal PJUTS ini bagi saya ini tetap harus dituntaskan. Jadi ya cuma waktunya 7 April, waktu besok sudah penutupan masa sidang, tanggal 5 kita sudah reses. Jadi memang harusnya memang hari

ini harus kita tuntaskan, kalau *nggak* menjadi beban juga bagi kami di daerah, pulang ditanyain lagi nih kapan Pak? Daerah kami belum nyala Pak, kampung lain sudah Pak, desa ini sudah, desa kami belum. Ini *kan* bingung juga kita menjawab jadi daerah ini, jadi beban betul, jadi beban kita Pak.

Jadi oleh karena itu memang harus ada solusi, jadi gimana *win-win solution*-nya agar ini bisa terselesaikan Pak.

Terima kasih.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Izin Ketua,

Jadi mungkin untuk agenda yang pertama karena ini terjadi apa namanya terjadi perubahan anggaran, ini kita lebih utamakan dalam rapat kerja hari ini lebih mengutamakan terkait divestasi PT Vale *kan*, cuma ini diselipkan terkait perpindahan anggaran *kan* dan perpindahan anggaran ini lebih kepada program dan program ini terkait dengan terbengkalainya beberapa program yang tidak dikerjakan di APBN 2023.

Nah, untuk itu kita perlu kajian yang lebih mendalam dan ini tidak cukup waktu menurut kami. *Nah* untuk itu di masa sidang yang akan datang kita *kan* masih ada pembahasan RAPBN 2024. Saya pikir di masa sidang yang akan datang kita jauh lebih pembahasan lebih komprehensif *kan*, lebih menyeluruh, bahkan ada potensi ada program anggaran perubahan. Jadi saya pikir untuk pembahasan anggaran ini saya pikir kita kesampingkan dulu atau kita bahas lebih detail di waktu yang akan datang. Jadi kita lebih tekankan ke divestasi PT Vale dulu, jadi untuk agenda nomor 1 saya pikir kita tiadakan dulu di rapat kerja hari ini.

Mungkin itu dari kami Pak Ketua.

F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Terima kasih Pak Eddy Pimpinan Rapat.

Yang terhormat Pak Menteri beserta jajarannya dan PT Vale.

Menyikapi berbagai hal tadi menjadi masukan tentang agenda hari ini, saya melihat apa yang disampaikan secara informal urgensi yang disampaikan Pak Menteri bisa diterima dengan baik bahwa memang ada hal-hal yang harus dilakukan dengan potensi adanya anggaran yang bisa dibuka.

Untuk itu kalau menurut saya jalan aja kita juga terus, apapun nanti dalam diskusi ini kesepakatan apa yang kita lakukan, *nah* itulah yang jadi kesimpulan, tidak serta-merta ditunda biar kita juga menjadi terang benderang juga *gitu* supaya semuanya jelas. Kalau memang dianggap nanti secara urgensi tidak urgen dalam forum terbuka ini ya kita tunda beberapa hal yang



harus kita tunda, tetapi tidak dengan serta merta lantas tidak diagendakan. Meskipun betul kita hari ini juga ada agenda dari Vale soal divestasi.

Saya kira itu, masing-masing kita punya pendapat, masing-masing kita punya juga argumentasi, kita sama-sama menghormati.

Terima kasih Pak Pimpinan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, izin Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sebelum memulai rapat tadi saya sempat bicara dengan Ibu Dirjen EBTKE terkait dengan rapat, beberapa RDP yang lalu ya minggu lalu. Ada masalah di dapil saya yang hingga saat ini orang Papua ribut terkait dengan galian PJUTS yang sudah mereka gali selesai sampai dengan Bulan Desember.

Kontrak mereka hanya menggali, tapi mereka akan dibayar apabila lampunya sudah nyala. Sekarang semua itu diberhentikan, lah dia bilang bukan kerjaan saya sampai di situ, terus siapa yang bayar saya? Negara jangan bohong terus.

Itu sudah saya sampaikan minggu lalu, terkait dengan hal tersebut sebenarnya menurut saya rapat ini memang cukup penting. Cukup pentingnya kenapa? seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Mukhtarudin rekan kita dari Golkar, ini sebenarnya mau dibawa ke mana dan apa yang harus saya jelaskan kepada masyarakat. Namun kembali lagi saya serahkan ke Pimpinan seperti apapun pasti kita ikut aja.

Terima kasih, Pimpinan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Izin Pimpinan,

Saya kira masalahnya *kan* sudah jelas bahwa ada anggaran yang selama ini tertahan dan tanggal 7 itu adalah batas waktu terakhir. Kalau tidak dibuka atau tidak dialokasikan untuk yang lain, maka anggaran ini akan hangus begitu ya Pak Dirjen ya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini mengingat waktu hari ini sudah tanggal 3, ini waktu kita bersidang sudah tanggal 6 kita sudah mulai reses lagi dan sudah tidak ada lagi rapat-rapat lagi sampai setelah lebaran. Oleh karena itu waktu yang tersisa itu akan lebih baik kalau kita manfaatkan untuk membahas yang ini Pak, supaya ada jalan keluar *kan* begitu daripada nanti anggaran ini tersisa, kemudian lewat begitu saja, tidak ada manfaatnya. Mungkin akan lebih manfaat tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang untuk AML lah, untuk PJUTS, BPBL *kan* begitu Pak.

Jadi saya kira lebih baik kalau kita memanfaatkan kesempatan pada hari ini untuk mencari jalan keluar.

Demikian, terima kasih Pak.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Iya intinya kami tidak berkeberatan soal pembahasan anggaran, tapi pembahasan anggaran itu harus butuh waktu yang sangat panjang dan butuh pembahasan yang sangat detail, apalagi ini menyangkut program. Kita ingin memaksimalkan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat, kita tidak ingin program-program yang sifatnya *project*, apalagi *project-project* yang dalam tahapan lidik aparat penegak hukum.

Kami mendengar *project* yang akan dilaksanakan ini *project* yang lagi di lidik APH *kan*, kami tidak ingin terlibat. Ini *project-project* yang sensitif, kami ingin mendorong pergeseran anggaran untuk proyek yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ini terjadi pergeseran anggaran untuk proyek yang disorot APH untuk diketahui teman-teman. Ini anggaran cukup besar, kami ingin hati-hati disisa jabatan yang tersisa beberapa bulan ini kita harus bekerja untuk masyarakat.

Kita ingin berhati-hati, kita tahu belakangan banyak penegakan hukum yang membuat mata kita terbelalak semua *kan*. Jadi jangan terjadi di kita ini menimpa sahabat kita, jadi kita tidak serta-merta melakukan pergeseran anggaran. Ini rapat, rapat *live*, saya yakin semua mata akan melihat, saya yakin semua aparat akan memantau.

Untuk itu kita ingin bahwa apa yang kita lakukan hari ini kita semata-mata demi unsur kehati-hatian. Jadi saya menghimbau apapun yang kita lakukan ini semata-mata kita demi asas kehati-hatian, asas kepatuhan kita dan tidak serta-merta kita merubah-ubah anggaran, apalagi anggaran yang sifatnya berbau-bau amis, berbau-bau *project* dan jadi kami ingatkan semua kawan-kawan, semua mitra bahwa kita tidak ada tendensi apa-apa. Kita ingin program ini berjalan dengan baik, kita ingin bahwa percepatan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Nah untuk itu terkait rencana perubahan anggaran ini kita ingin ada diskusi yang matang, baik dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian ESDM ataupun kementerian teknis lainnya karena semata-mata apapun yang kita lakukan tujuannya dan pencapaiannya dapat kita jelaskan dengan baik kepada publik pada saat kita lakukan perubahan ini.

Mungkin itu dari kami Ketua, jadi kita minta dalam rapat ini untuk rencana perubahan ini kita simpulkan dulu apa yang rencana akan kita ubah *kan*. Jadi kita harus tekankan apa target pergeseran itu, toh juga ini baru triwulan pertama. Kalau dibilang ini penyerapan ini baru 3 bulan kok, ini baru bulan ketiga, di mana buru-burunya, ini baru bulan Maret, ini April-April awal, kok kita



kayak terburu-buru *gitu* loh mau menyerap anggaran gitu loh. Apa kayak kita kayak kejar target aja gitu loh.

Mari kita serap anggaran dengan baik, kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya pikir apa yang disampaikan teman-teman tadi dari Pak Bambang Hermanto, walaupun kita akan ada perubahan kita ubah memang untuk yang kemarin target program-program yang terbengkalai untuk yang capaiannya langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Mungkin itu Ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Jadi saya usul begini Ibu-Bapak, ini dalam rangka untuk juga kita tetap menjaga transparansi, Pak Menteri nanti kita minta untuk mempresentasikan materinya ya agar kita bisa ketahui juga secara umum, publik juga bisa tahu apa saja yang menjadi materi untuk pergeseran anggaran tersebut. Kita bisa tidak membuat keputusan hari ini, bahkan kita bisa juga menolak dalam hal ini, menerima juga bisa tetapi ada opsi-opsi ya menerima, menolak, tidak membuat keputusan untuk dipelajari lebih lanjut, tetapi saya kira untuk menjaga transparansi.

Saya kira disampaikan saja nanti oleh Pak Menteri, untuk kita bisa kemudian pelajari dan kita bisa dalam lebih lanjut. Bahkan teman-teman di sini saya kira juga nanti akan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mendalami apa yang menjadi dasar untuk pergeseran begitu.

Saya kira begitu ya Ibu-Bapak ya? Baik. Kalau begitu kita bisa lanjut agenda kedua, Komisi VII DPR RI menaruh perhatian terhadap divestasi PT Vale Indonesia, Tbk kepada Pemerintah Indonesia melalui Mind-ID sebagai *holding* tambang BUMN, termasuk juga proses divestasi yang baru saja berjalan. Di mana kemudian PT Mind-ID menjadi pemegang saham terbesar di antara pemegang saham yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri ESDM RI, Dirut Mind-ID dan Dirut Vale Indonesia juga terkait masalah perpanjangan kontrak Karya menjadi IUPK, termasuk di dalamnya rencana kerja antara pemilik saham PT Vale Indonesia ke depannya.

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Menteri ESDM RI untuk bisa memberikan pemaparan untuk agenda pertama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan untuk agenda kedua. Di mana kami akan persilakan Dirut Mind-ID dan Dirut Vale Indonesia untuk menyampaikan paparan jika memang diperlukan lebih lanjut.

Terima kasih, kami persilakan Pak.



MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Bapak.

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, Para pejabat di Kementerian ESDM, Direksi BUMN, Mind-ID dan PT Vale, serta hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja dengan agenda optimalisasi *output* cadangan antara Eselon 1 Kementerian ESDM dan kedua RDP terkait dengan perpanjangan kontrak karya Vale Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pertama perkenankan kami untuk menyampaikan optimalisasi *output* cadangan antar unit Eselon 1 Kementerian ESDM.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana surat kami kepada Pimpinan Komisi VII DPR RI Nomor 156 KU.02 tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024, hal permohonan persetujuan Komisi VII DPR RI atas RKAKL alokasi anggaran tahun anggaran 2024 Kementerian ESDM. Sehubungan dengan optimalisasi *output* cadangan antar unit Eselon 1 Kementerian ESDM, kami dapat jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menyebutkan bahwa pergeseran antar program unit Eselon 1 harus dengan persetujuan DPR RI.

Saat ini terdapat *output* cadangan (OC) pada program dukungan manajemen sebesar 536,67 miliar di Direktorat Jenderal Minerba dan sebesar 62,33 miliar di Inspektorat Jenderal yang bisa dibuka blokirnya apabila digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat mendesak, darurat dan tidak dapat ditunda melalui mekanisme revisi dipa.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S 238 MK.02 2024 tanggal 13 Maret 2024, hal persetujuan penggunaan dana PNBPI iuran produksi royalti minerba tahun anggaran 2024 dan penjualan hasil tambang tahun anggaran 2025-2027, Kementerian ESDM mendapatkan tambahan sebesar Rp70,48 miliar. Adapun pemanfaatan *output* cadangan antar program antar unit Eselon 1 Kementerian ESDM dilaksanakan dengan kegiatan, sebagai berikut:

1. Kelanjutan pelaksanaan *project* pipa transmisi Cirebon-Semarang tahap 2, ruas batang Cirebon-Kandanghaur Timur yang merupakan program strategis nasional Ditjen Migas menjadi 1,32 triliun, dengan

tambahan alokasi anggaran sebesar 341,49 miliar dan juga *visibility* studi pipa Duri-Seimangke sebesar Rp30 miliar.

2. Tambahan bantuan pasang baru listrik pada Ditjen Ketenagalistrikan sejumlah 42.000 rumah tangga senilai Rp103 miliar.
3. Kemudian pembangunan PJUTS sejumlah 8.590 unit senilai Rp150 miliar, perlu penambahan dari sisa paket 1, 3, 4 dan 5 serta biaya pemeliharaan seluruh paket, serta bantuan konversi motor BBM ke motor listrik sejumlah 4.000 unit senilai Rp45 miliar.

Dengan adanya *output* cadangan yang dapat dimanfaatkan sebesar 599 miliar dan adanya tambahan penggunaan dana PNBPN sebesar 70,68, 70,48 miliar maka rincian alokasi anggaran per Eselon 1 mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal tetap sebesar 548,42 miliar,
- Inspektorat Jenderal berkurang sebesar 62,33 miliar menjadi 145,19 miliar,
- Direktorat Jenderal Migas bertambah sebesar 371,5 miliar, hingga menjadi 2,15 triliun,
- Ditjen Ketenagalistrikan bertambah sebesar 103 miliar, sehingga menjadi 465,17 miliar,
- Ditjen Minerba berkurang sebesar 536,68 miliar hingga menjadi 713,02 miliar,
- Sekjen DEN tetap sebesar 57,32 miliar,
- BPSD ESDM tetap sebesar 571,05 miliar, adanya penambahan target penerimaan BLU sebesar 3,78 miliar,
- Badan Geologi tetap sebesar 1,27 triliun,
- BPH Migas tetap sebesar 231,16 miliar,
- Ditjen EBTKE bertambah sebesar 195 miliar hingga menjadi Rp645,18 miliar,
- BPMA Aceh tetap sebesar 78,93 miliar.

Besar harapan kami usulan tersebut dapat disetujui oleh Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII untuk kami teruskan kepada Menteri Keuangan. Perlu kami tambahkan terkait dengan program-program yang masih belum terselesaikan yaitu kita akan carikan jalan keluarnya.

Kemudian yang item nomor 2 ini terkait dengan RDP dengan PT Vale, perpanjangan kontrak Karya PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus. Pemerintah dalam memberikan perpanjangan kontrak menjadi IUPK itu telah dilakukan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus, IUPK ini berlaku sampai tahun 2035 adalah untuk memberikan kepastian penyediaan bahan baku bagi industri hilir.

Sebagaimana hasil Rapat Terbatas pada 8 November 2023 diperlukan langkah-langkah percepatan proses perpanjangan kontrak Karya PT Vale Indonesia, Tbk menjadi IUPK menggunakan jasa pihak ketiga untuk evaluasi harga saham sebelum divestasi dilakukan berdasarkan harga pasar yang wajar dan tidak memperhitungkan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan. Divestasi yang disetujui adalah 14% tambahan dari yang sebelumnya, serta pemerintah akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale Indonesia.

Terdapat beberapa hal terkait IUPK harus terbit lebih dahulu, yaitu:

- Jika tidak danya IUPK akan sulit mendapatkan persetujuan OJK karena dianggap memiliki ketidakpastian yang tinggi,
- Kedua belah pihak sepakat antara Mind-ID dan PT Vale untuk IUPK diterbitkan harus disepakati sebelumnya divestasi saham,
- Kemudian *conditional sales* dan *purchase agreement* sudah mengikat sudah *binding*,
- Kemudian adanya persetujuan anti trust dari beberapa negara untuk melihat keseriusan pemerintah dalam penerbitan IUPK PT Vale Indonesia.

Secara historis PT Vale Indonesia, Tbk. dianggap sudah melakukan pemenuhan kewajiban divestasi sebelumnya sebesar 20% pada tahun 1990 yang dibuktikan dengan adanya penawaran saham melalui bursa saham Jakarta Bapepam, saham yang dijual di bursa diakui sebagai bagian dari saham pemerintah. Penawaran saham 20% merupakan pelaksanaan kewajiban di divestasi perusahaan yang berdasarkan KK (Kontrak Karya) 1998 yang diperkuat juga pada amandemen Kontrak Karya pada tahun 2014.

Sebagai salah satu persetujuan penetapan rencana pengembangan seluruh wilayah atau RPSW untuk mengajukan permohonan perpanjangan kontrak menjadi IUPK, PT Vale wajib melaksanakan komitmen investasi dan pembiayaannya. Dalam hal ini yang telah disepakati adalah:

- a. Proyek investasi tambang nikel dan HPAL Sorowako sebesar 2 miliar dolar rupiah, dimulai syaratnya akan pada tahun 2027.
- b. Kemudian investasi tambang nikel dan HPAL Komala sebesar 4,6 miliar dolar yang akan startup di akhir tahun 2026, dan
- c. Investasi tambang nikel dan RKF Bahodopi sebesar 2,6 miliar *startup*-nya tahun 2026.

Proses divestasi ini ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024 dengan beberapa milestone, yaitu:

- 19 April 2024 akan dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa,
- Kemudian 5 Juni 2024 adanya konfirmasi *right issue* oleh Otoritas Jasa Keuangan,
- Kemudian 21 sampai 27 Juni 2024, periode *right issue*,
- 1 Juli 2024 *allotment* atau penjatahan distribusi saham.

Dengan adanya tambahan investasi 14% kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka saham PT Vale Indonesia, Tbk. menjadi 34% untuk Mind-ID sehingga menjadi pemilik saham terbesar, diikuti oleh Vale Kanada sebesar 33,88%, saham publik yang sudah mendapat yang sudah didapat sejak 1990 sebesar 20,63% dan Sumitomo Metal Mining 11,48%.

Selain perubahan komposisi saham juga akan diikuti oleh perubahan susunan komisararis dan direktur, yaitu;

- Mind-ID akan memiliki hak untuk menominasikan komisaris utama, 2 komisaris lain, serta presiden direktur atau CEO dan direktur yang bertanggung jawab terhadap human *resource*.
- Vale Canada akan memiliki hak untuk menominasikan wakil komisaris utama, 2 orang komisaris, serta direktur operasi dan direktur terkait dengan *sustainability*,
- Sedangkan Sumitomo akan memiliki hak untuk menominasikan 1 komisaris.

Permohonan perpanjangan KK PT Vale menjadi IUPK telah selesai dievaluasi terkait aspek administrasi teknis lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan. Terkait proses penerbitan SK IUPK PT Vale Indonesia Terbuka, Menteri ESDM telah menyampaikan draft SK IUPK PT Vale Indonesia kepada Menteri Investasi Kepala BKPM melalui Surat Nomor T154/MB.04 ESDM tahun 2024 pada tanggal 22 Maret hal pengantar pemberian izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian PT Vale Indonesia Terbuka.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan kami singkat mengenai topik yang telah diagendakan pada hari ini, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bapak Menteri.

Kemudian kami lanjutkan dengan pemaparan untuk agenda kedua di mana kami persilahkan Dirut Mind-ID dan Dirut Vale untuk menyampaikan paparannya.

Kami persilakan.

DIRUT MIND-ID (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Para Anggota Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Sebenarnya sudah banyak hal yang disampaikan oleh Menteri ESDM, jadi mohon maaf kiranya nanti update dari kami hanya mengkonfirmasi atau mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri ESDM.

Pertama-tama, kami ingin memberikan update bahwasanya tadi juga ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, kewajiban divestasi PT Vale Indonesia, Tbk. tahun 1990.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Pertama, bahwa kami tidak mendapatkan paparan ini ya, saya *nggak* tahu tidak ada bahan paparan ini atau baru akan dibagikan *gitu* ya. Yang kedua, juga tadi sebetulnya *kan* secara umum Pak Menteri juga sudah menyampaikan paparan tentang persoalan yang poin agenda kita yang kedua ini *gitu*. Jadi menurut saya dengan waktu yang ada, dengan keterbatasan yang ada seperti ini kita cukupkan dengan paparan Pak Menteri dulu.

Kalau kemudian nanti memang misalkan ada yang harus kita detikan lagi baru disampaikan paparan dari Mind-ID gitu maksud saya. *Kan* tadi Pak Menteri juga sudah langsung memaparkan 2 agenda ini *kan* secara umum itu. Jadi maksud saya supaya kita langsung, iya langsung kepada pendalaman *gitu* maksud saya *gitu* Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Dari Vale tidak ada materi *juga sebelumnya?* belum ada, belum ada materi yang dikirim sebelumnya. *Oke* ya udah, baru sekarang kita terima ya.

Oke kalau *gitu* dan dengan persetujuan Pimpinan dan Anggota kita langsung melakukan pendalaman aja ya? Baik. Kalau begitu kalau kita mulai pendalaman PT Vale dulu ya mumpung ini PT Vale, kita kan sekarang rapat dengar pendapat dengan PT Vale ya jadi kita tuntaskan dulu dengan PT Vale.

Kami persilakan rekan-rekan langsung bisa memberikan pertanyaan, pendalaman terkait apa yang disampaikan tadi terkait apa yang menyangkut PT Vale, mau divestasi, mau perpanjangan IUPK silakan.

Kami persilakan dari PDP ada? Bu Mita, silakan Bu Mita.

F-PDIP (PARAMITHA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta Anggota Komisi VII,
Dan yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Terkait izin perpanjangan untuk PT Vale setahu saya *kan* angka 20 tahun untuk perpanjangan itu adalah hasil rekomendasi dari Kementerian ESDM, bukan Kementerian Investasi. Yang saya ingin tanyakan pertimbangannya apa untuk memberikan izin sampai 20 tahun, terus kenapa

tidak 10 tahun atau mungkin dikurangi lagi begitu agar mereka itu bisa selesaikan pembangunan *smelter* dan lain-lain *kan* paling 5 tahun, untuk berproduksi dan lain-lain setelah itu baru perpanjangan lagi.

Jadi saya ingin mempertanyakan kenapa 20 tahun itu apa pertimbangannya, kemudian infonya PT Vale itu berbeda dengan PT Freeport. Kalau di Vale ini rencananya nanti *top management* dan komisaris akan ditentukan oleh kita melalui Mind-ID, sementara kalau di Freeport meskipun mayoritas saham milik Indonesia tetapi direksi komisaris dan top manajemennya masih dikendalikan oleh Freeport McMoran. *Nah* saya ingin menanyakan Pak kenapa ada perbedaan seperti itu, padahal di kedua perusahaan kita sama-sama sudah memegang saham mayoritas yang Freeport kenapa tidak bisa begitu.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Karena pertanyaan pendek mungkin Pak Gunhar mau ditambahkan, silakan biar PDIP kita bisa tuntaskan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Atau biar adil digilir dulu fraksi lain nanti baru PDIP.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, baik langsung ke Partai Golkar kalau begitu.

Pak Baher silakan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Ini kita bahas yang awal apa yang poin 1 poin 2 nih Pak? Oh, Vale.

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran Direksi PT Vale yang saya hormati.

Saya singkat saja barangkali Pak, ini setelah melalui proses yang begitu panjang nih Vale ini *kan*, apa kira-kira rencana ke depan setelah mendapatkan kontrak baru, perpanjangan ya ini kira-kira rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini seperti apa Vale ini karena kalau kita lihat ini *kan* perpanjangan kontrak Vale itu *kan* menuai banyak kontroversi begitu. Jadi oleh

karena itu saya kira dalam kesempatan ini perlu juga Vale memberikan keyakinan kepada kita semua dengan menyampaikan selain rencana ke depan juga barangkali menyampaikan laporan apa yang sudah selama ini sudah dilakukan begitu *kan*.

Saya kira demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Lanjut dari Gerindra, silakan.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Izin Pak Kapoksi, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri dan juga Dirut PT Mind-ID dan juga Dirut PT Vale atau yang mewakili.

Pak Menteri Pak Arifin Tasrif selaku mitra Komisi VII, pertama-tama saya ingin melakukan interaktif dengan Pak Menteri karena Pak Menteri selaku wakil dari negara. Kami ingin bertanya sedikit Pak Menteri, apa yang dilakukan Pak Menteri selama proses divestasi antara PT Vale dan Mind-ID, bisa dijelaskan sedikit Pak? Apa yang sudah dilakukan hingga terjadi per detik ini Pak, sampai terjadinya proses divestasi ini. Apa yang sudah dilakukan perjuangan Pak Menteri apa *gitu*.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Pak Bambang yang saya hormati.

Jadi program yang kita laksanakan ini memang merupakan bagian daripada rapat-rapat kabinet yang dilakukan, ini udah bidang di ESDM nih hanya sesuai dengan apa yang kita tangani. Sebagaimana diketahui bahwa kontrak awal daripada Vale adalah kontrak karya yang akan berakhir di tahun 2025 dan sebagaimana dalam peraturan 5 tahun sebelumnya itu harus ada usulan untuk continuation atau tidak.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang 3/2020 bahwa pertambangan tuh harus memiliki program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah. Dalam hal ini kita lakukan konfirmasi kepada pihak Vale apa yang akan dilakukan, kalau permintaan untuk perpanjangan ini diberikan. Tadi telah kami sampaikan ada 4 program ya yang semuanya bernilai kurang lebih 11 koma hampir 11,5 miliar dolar yang akan dilakukan diselesaikan sampai dengan tahun 2029, 2 diantaranya tahun 2029 udah selesai.

Untuk itu memang harus ada kepastian ya harus ada kepastian jaminan *supply* untuk bahan bakunya. Kemudian sesudah itu ada yang diminta oleh pemerintah bahwa dalam undang-undang itu dipersyaratkan bahwa divestasi oleh investasi asing untuk di sektor pertambangan ini harus dilakukan proses divestasi ya pada saat izin perpanjangan, sehingga bisa mencapai 51% saham pemerintah.

Nah di tahun 2020 waktu itu sudah 20% daripada saham Vale ini tuh dilakukan *divestment*. Waktu itu karena tidak ada kemampuan untuk dari dalam negeri untuk mengambil alih maka diputuskan untuk di 20% ini ditawarkan ke bursa saham Indonesia dianggap sebagai apa, sebagai bagian dari pemerintah, itu tahun '90.

Kemudian *nah* kalau 51% itu berarti ya 11% lagi, 11% lagi yang harus dilakukan *divestment*. *Nah* disepakati bukan 11% tetapi kemudian menjadi 14% sehingga Mind-ID itu bisa memiliki 34% dan PT Vale itu 33,8% kalau *nggak* salah. Divestasi yang 14% ini itu dilakukan proses evaluasi nilai dan kemudian sudah disepakati antara BUMN dengan PT Vale dan juga itu melibatkan juga ESDM, BUMN dan juga Kementerian Maritim dan Investasi.

Kami sesuai dengan program kami Kementerian ESDM mengisi ulang **(suara tidak jelas 45.34)** dan kemudian kita siapkan IUPK draf ya sesuai dengan poin-poin yang memang akan di yang memang menjadi bidang kami yaitu yang tadi kami sampaikan terkait mengenai aspek administrasi, teknis lingkungan, finansial di perusahaan, serta kinerja perusahaan.

Jadi dengan disepakatinya, dengan disepakatinya komitmen untuk divestasi dengan nilai tersebut maka proses selanjutnya adalah IUPK ini harus segera disampaikan agar ini dapat menjadikan bahan proses untuk di OJK.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Pak Menteri, *lead*-nya untuk negosiasi itu kementerian apa?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

BUMN contoh negosiasi *value* ya, *value*-nya, kita hanya teknis saja di IUPK.

Jadi disepakati waktu itu bahwa kedua belah pihak setuju memang nilainya cukup, cukup menarik lah buat pemerintah karena memang ini Vale juga akan rencana untuk melibatkan investasi dari *Volkswagen* dan Ford yang akan di apa yang akan mengembangkan teknologi perbateraian untuk kendaraan listrik.

Jadi itulah rule yang kita sampaikan, selanjutnya IUPK ini di Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izinnya.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Baik Pak Menteri, pertanyaan saya 1 Pak Menteri.

Pak Menteri, pernah *nggak* mengusahakan atau berjuang atas nama bangsa Indonesia, atas nama putra terbaik bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia yang mencintai bangsa Indonesia berjuang pengen memiliki 51% saham PT Vale di dalam proses negosiasi itu.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Dan ternyata bisa di-*device* 54%.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Bukan, pertanyaan saya pada saat proses kemarin ada *nggak* Pak Menteri niat aja dikit aja Pak, tercetus di dalam lubuk hati Bapak pada saat negosiasi itu atas kecintaan Bapak terhadap Republik ini. Bapak berikrarlah atau menyampaikan ke PT Vale kami pengen sebagai saham pengendali, kami pengen 51, ada *nggak* di dalam proses itu Pak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Pak Bambang, saya bekerja untuk pemerintah 40 tahun lebih dan ini dharma bhakti saya itu udah saya buktikan sampai dengan saat ini.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Pertanyaan saya bukan dharma bhakti Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Di Vale ini ya saya juga memproses demi ya, demi penambahan, peningkatan, peningkatan nilai ekonomi daripada sumber alam kita yang ada di sana.

F-GERINDRAWAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Saya ada pertanyaan lebih lanjut Pak, ini ada korelasi dengan tanggung jawab Pak. Kami ingat rapat kerja tanggal 13 Juni 2003, Bapak membawa mandat dari ruangan ini Pak. Ini mandat resmi DPR Pak, kami bekerja atas nama Undang-Undang MD3. Bapak wajib melaksanakan, saya bacakan sekali lagi Pak, ini untuk diketahui khalayak banyak, untuk diketahui seluruh rakyat di seluruh Republik Indonesia bahwa kami Dewan Perwakilan Rakyat sudah menggaungkan atas kecintaan kami terhadap bangsa kami, ini di poin 1.

Kesimpulan rapat Komisi VII mendesak Menteri ESDM RI dalam proses divestasi saham PT Vale Indonesia, Tbk, agar mendukung Mind-ID untuk menjadi saham pengendali guna mendapat hak pengendalian operasional dan *finansial consolidation* sebagai bentuk penguasaan negara melalui BUMN.

Tadi saya mendengar cerita Bapak sama sekali, walaupun saya tahu dharma bakti Bapak 40 sekian tahun, wajar, saya belum seumur itu Pak. Mungkin kalau saya seusia situ mungkin saya bisa lebih juga Pak, tapi buat saya kita bekerja untuk negara tidak perlu hitung-hitungan tapi kita bekerja untuk negara, kita tulus dan ikhlas.

Kita buktikan aja sampaikan kepada publik bahwa kita bekerja memang untuk bangsa kita yakinkan bahwa apa yang kita kerjakan nyata untuk Republik Indonesia. Maka itu saya belum mendengar, belum satupun Bapak berusaha, belum sedikitpun tadi dari cerita Bapak, Bapak berjuang seperti mandat dalam rapat kerja kami.

Kami memberikan kepada Bapak dan ini disepakati ada tanda tangan Bapak, kami bersepakat bahwa Bapak akan berjuang akan menjadikan Mind-ID saham pengendali. Tapi nyatanya sekarang kita hanya dapat 34% dan kita anak kecil pun tahu Pak 34 itu bukan *majority* Pak. *Majority* itu tetap 51 Pak, jadi buat kami jujur kami merasa di DPR Undang-Undang MD3, kami bekerja sesuai undang-undang Pak tapi mandat undang-undang yang telah kami jalankan dan kami tadi di dalam pembukaan rapat Bapak juga menyampaikan menjalankan tugas-tugas konstitusional kita. Saya, Bapak juga menjalankan tugas konstitusional tapi di dalam perjalanan kita sama-sama, kita melihat tidak ada yang dijalankan. Ini buat koreksi kita bersama.

Jadi beberapa poin yang di dalam kesimpulan rapat sama sekali tidak ada, padahal kesimpulan rapat di dalam undang-undang, di dalam tata tertib itu jelas wajib dilaksanakan. Tidak ada di situ dipertimbangkan, tidak ada Pak, maknanya wajib. Di sini berarti Kementerian ESDM selaku mitra sama sekali tidak mengindahkan, sama sekali tidak menjalankan. Jadi kami merasa bahwa apa yang kami lakukan rapat berkali-kali sama sekali tidak diindahkan, bahkan tidak dilakukan untuk dilaksanakan di dalam proses divestasi bersama PT Vale, Tbk.

Dan untuk itu saya pikir mungkin Pak Ketua dan juga seluruh Anggota Komisi kita untuk diketahui bahwa kita sudah berkali-kali rapat terkait PT Vale dan kita juga mengetahui ada banyak proses di lembaga lain, baik di BPK juga masih ada proses audit yang belum selesai. Namun masih di Kementerian ESDM juga terus dilakukan negosiasi tanpa mengindahkan lembaga lain, kita tidak ingin suatu ketika ada prosedur yang terabaikan. Kita hanya mengingatkan karena kita sama-sama antar lembaga kita lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, jadi kita mengingatkan mungkin saat ini tidak apa-apa, di kemudian hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

Mungkin itu dari saya, terima kasih.

Wabillahittaufig wal hidayah,



Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut Fraksi Partai Nasdem, ada? Pak Rico silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terkait dengan divestasi tadi jadi teringat apa yang disampaikan sama Pimpinan Pak Bambang tadi, jadi dulu kita sebenarnya sudah punya kesimpulan rapat yang harus ditindaklanjuti. Pertanyaannya adalah izin interaktif dengan Pak Menteri.

Izin Pak Menteri, apakah sudah pernah tadi terkait dengan divestasi itu sudah dirapatkan dengan tim tadi yang disebutkan menteri yang terkait, semua menteri yang terkait. Apakah pernah dirapatkan dan kalau memang pernah dirapatkan, apa sih kesimpulannya dari itu semua? Sehingga ada divestasi yang jadi 34 itu.

Mohon interaktif Pimpinan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih.

Jadi Kementerian ESDM ini dalam proses ini tidak akting sendiri, kita juga ada kementerian yang terlibat terutama peran dari kementerian dari BUMN, juga Kementerian Keuangan, kemudian juga Kementerian Maritim dan Investasi. Kita itu hanya di sektor yang terkait dengan pertambangan, kontrak karya menjadi IUPK. Aspek-aspek yang ada di dalam itulah yang kita, kewajiban untuk 51% ini amanah ini kami jalankan dengan baik ya malah pihak investor itu men-*device* totalnya sampai 54% dengan kesepakatan yang ada ini.

Nah itulah yang apa dan kemudian negosiasi mengenai nilai divestasi itu dilakukan antara manajemen Vale Kanada dengan Menteri BUMN, dalam hal ini diwakili oleh wakil menteri dan deputi dari Marinvest. *Nah* kami sendiri juga ada di situ. Sebelumnya juga sudah ada komunikasi langsung antara Kementerian BUMN, dengan Vale Kanada tapi itu yang terkait dengan masalah korporasi, korporasi kita *nggak* ikut karena domainnya dari domain BUMN.

Jadi itulah **(suara tidak jelas 57.41)** antara batas kewenangan kita yang kita lakukan dan batas kementerian lain yang memang membidangi bidangnya masing-masing dan **kemudian** kita tuh berkordinasi ya sehingga sampai yang terakhir pun IUPK kita keluarkan berdasarkan permintaan juga dari BUMN dan



juga investasi, sebagaimana yang memang disyaratkan untuk memproses ini bisa menjadi proses selanjutnya.

Jadi kalau memang nanti **kita**, pihak Mind-ID ingin menguasai sampai 51% ya itu silakan aja, kami, kami dukung sesuai dengan, tapi *kan* ini kita harus melihat juga bahwa program perpanjangan ini terkait dengan rencana investasi yang telah kami sampaikan, ada kurang lebih 11,5-11,2 miliar dolar yang akan **diselesaikan** mulai dari tahun 2026 sampai 2028, 2029. *Nah* itu yang kita kejar dan kita masukkan itu dalam persyaratan IUPK. Kalau dalam tahun tersebut tidak terjadi terealisasi maka ini akan di, kita akan batalkan. Itu yang sudah disepakati.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, terima kasih.

Lagi Pak Menteri izin, apakah saya dengar *kan* kita udah 7 kali rapat ya terkait dengan ini pembahasan-pembahasan ini. Apakah juga saya juga pernah dapat informasi bahwa sudah pernah dilakukan juga Ratas dengan Pak Presiden terkait dengan hal ini. *Nah*, apakah semua itu sudah juga diketahui oleh Pak Presiden?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Sebelum keputusan-keputusan lanjutan dilaksanakan diproses semuanya juga melalui, dengan melalui Rapat Kabinet Terbatas dan melibatkan seluruh Kementerian yang terkait, Menko Marinvest, Menko Perekonomian, kemudian Menteri BUMN, juga Menteri Keuangan, Menteri Investasi juga

F-NASDEM (RICO SIA):

Oke baik, berarti kesimpulan rapat yang waktu itu kita sudah sepakati bersama yang Pak Menteri juga tanda tangani sudah 51% diperjuangkan itu berarti sudah Pak Menteri laksanakan ya. Cuma saja keputusan itu bukan ada di tangannya Pak Menteri seorang diri, ada di kelembagaan lain.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kita kolektif ya karena aspek-aspek masing-masing itu ada di kementerian lain-lain.

F-NASDEM (RICO SIA):

Oke, berarti yang 34% ini sudah disepakati.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Sudah di sepakati di kabinet.

F-NASDEM (RICO SIA):

Dan juga sudah diterima, kalau Mind-ID mungkin saya pikir cuma pelaksana ya. Jadi mungkin dari Menteri BUMN juga sudah ya *kan* jadi.

Baik, mungkin itu saja dari saya.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Iya Pak sekaligus menyambung.

Mungkin begini soal interpretasi yang memang konteks 51% itu menjadi bias di masyarakat karena ada perbandingan, kalau Freeport itu *kan* 51 bulet sementara ini sudah terlanjur *go public* dulu yang 20% *kan* begitu. Jadi 50% itu adalah 3, sekarang bahkan 54% itu adalah yang dulu Mind-ID 20% plus kemarin divestasi 14% plus 20% yang sudah terlanjur *go public*.

Maka itulah pemahaman 54% bahkan tetapi tidak sepenuhnya dikuasai tanda kutip dikuasai oleh negara karena 20%-nya sudah terlanjur *go public* yang itu itulah. Beda dengan Freeport memang, Freeport *kan* bulat memang itu 51 persen menjadi Mind-ID milik sekian dan pemerintah daerah itu 10% kalau tidak salah, jadi 41 dan ini bulat menjadi 51% bulat menjadi milik negara. Representasi negara dalam hal Freeport ya ini baik Mind-ID maupun juga oleh pemerintah daerah dan itu mungkin yang menimbulkan interpretasi bahwa hari ini belum 51% karena yang 20% itu adalah publik.

Itu mungkin Pak Menteri yang menjadi apa *dispute* di tengah-tengah masyarakat itu. Saya kira itu sekedar menambahkan biar juga kita memahami secara bahwa juga ada semacam kecurigaan. Ada kecurigaan yang 20% itu tidak ke publik *gitu* loh tetapi kembali kepada *owner*, itu *kan* persoalannya memang tadi juga Pak Menteri menyampaikan secara proporsional tanggung jawabnya di lembaga lain kalau untuk mengusut tentang kenapa 20% kalau dan tadi disampaikan dalam *go public* ini yang memang kementerian yang secara berwenang, secara lebih khusus adalah Menteri BUMN dan memang kalau kita lihat negosiasinya kita lihat Pak Erick Thohir yang senantiasa di depan, khususnya menyangkut harga misalnya harga pasar sekarang 4.000 sekian dan itu dibeli dengan 3.050 dan sebagainya.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Harusnya yang 20% yang terduga terafiliasi lah, terafiliasi dengan yang dulu pernah saya tuduh cangkang mereka juga *gitu* loh karena itu ada. Kami dapat info dari OJK *kan*, itu mereka itu masih terafiliasi bahkan ada itu dugaan itu perusahaan salah satunya itu dana pensiun Sumitomo of taker dari PT Vale juga. *Nah* harusnya itu ada regulasi yang jelas dong Pak, jadi jangan jeruk makan jeruk. Jadi sahamnya publik tapi punya mereka juga *kan*, jadi gimana kita mau, mau mengakuisisi dikatakan kita *majority* kalau mereka ternyata mereka lebih kuat lagi. Bahkan ada yang kemarin di kita di Panja Vale itu ada mereka ada perjanjian khusus ya, Pak Dirut ya antara Sumitomo dengan PT Vale itu ada di sini Pak.

Jadi sahamnya Sumitomo itu dikendalikan oleh PT Vale, jadi walaupun mereka seolah-olah terpisah tapi mereka di bawah kendali. Jadi secara tidak langsung mungkin mereka ini satu kelompok, satu koalisi lah Pak. Jadi kita 34% ini *nggak* ada artinya *gitu*.

Nah itulah kenapa kemarin kami diskusi dengan Mind-ID waktu kita rapat Panja, kenapa mereka minta tetep berkehendak pengen menjadi saham pengendali karena salah satunya kesulitannya di situ, karena mereka akan berkomplot ini antara Sumitomo dengan PT Vale berkomplot untuk melawan BUMN kita *gitu* loh.

Jadi selamanya walaupun kita 34, seolah-olah kita paling tinggi, tapi kenyataan di lapangan kita akan dikeroyok *gitu* loh karena mereka 2 komplotan inikan, jadi mereka ini tetap bersekongkol di dalam. *Nah* untuk itu ini yang harus diurai, jangan sampai kita seolah-olah paling tinggi 34 tapi kenyataannya di dalam pengambilan keputusan mereka justru paling kuat.

Nah ini, itu yang saya tadi bilang Pak Menteri, inilah butuh kita anak-anak bangsa ini kita yang membela kemandirian bangsa kita di tanah apa sumber daya kita harus kita kuasai Pak *gitu* loh, sesuai amanat Undang-Undang Dasar kita. Makanya saya tuh sedih banget ketika Vale kita hanya bisa dapat 34, walaupun selalu bicaranya ini udah ada 20 di luar, ini ada 34 ditambah 20, 54. Ini kamufase ini palsu-palsu ini Pak, aslinya 34 ini kita tidak berdaya Pak. Ini Vale sama Sumitomo ini komplotan ini, Sumito ini *off taker*-nya Vale kok.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Sebentar Pak Gunhar.



Mereka ini berkomplot, kita biarkan BUMN kita diperkosa oleh dua perusahaan asing kok dan kita diam *gitu* loh. Saya itu jujur aja sedih dan kenapa perpanjangannya buru-buru banget, kenapa *nggak* nunggu setelah ntar aja toh masih 2025 *gitu* loh. *Kok* kayaknya diburu-buru sebelum ini, sebelum pemilu *gitu*, jadi saya ngelihat ini ada sesuatu yang sangat dipaksakan *gitu* loh.

Kita ini kekayaan alam kita gimana kita mau mandiri kalau kita melihat yang 20 aja ini *nggak* jelas siapa pemiliknya, 20% yang di publik, publik mana? Orang Indonesia mana? *kan*. Orang kita bisa lihat *kok* di bursa *kok* itu ada beberapa perusahaan asing ada yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan itu. Mudah *kok* dilihatnya, masih bisa dibilang kita *majority*, kita paling gede dengan bangganya, bangga gimana, kita sedih lah ngeliat *gitu*.

Kalau Freeport kita bangga 51, kita salut dengan Pak Presiden 51% kita acungkan jempol. Vale kita masih sedih, kita dikeroyok, kita tidak berdaya itu tidak berdaya *nggak* tahu sehebat apakah ini, segitu lemahnya kita di hadapan PT Vale. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki, mumpung masih belum terlambat *gitu*.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ya, Pimpinan, saya dulu atau Pak Sartono? Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Dirut Mind-ID, terima kasih juga Direktur Vale.

Tadi saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Komisi VII, saya terharu Pak ternyata teman-teman saya masih memiliki semangat yang kenceng nasionalisme kemandirian energi. Sudah mendengar juga jawaban Pak Menteri, mendengar juga jawaban Pak Dirut Mind-ID, tapi saya ingin menanyakan langsung kepada PT Vale, langsung kepada PT Vale. Sebelum saya tanya Pak, saya bikin konstruksi legalnya dulu, nanti baru saya tanya, Bapak jawab.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat (3) "tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat", satu.

Yang kedua, Undang-undang Minerba, Pak. Undang-Undang Minerba pasal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 169A ayat (1) sampai dengan (5) yang kedua. Jadi Undang-Undang Dasar, undang-undang, ada turunan PP, PP-nya PP 96 Tahun 2021 Pasal 147 tentang divestasi 51%, perubahan dari kontrak karya ke IUPK.

Terus yang ke-4, ini ada laporan dokumen di kami bersama Pak Menteri ESDM, Komisi VII bersama dengan Dirut Mind-ID bersepakat untuk menginvestasikan saham PT Vale 51%. Jadi secara konstruksi hukumnya



menurut saya dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, teknis rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM sudah mencukupi persyaratan Pak. Tidak ada lagi tahapan yang dilalui atau dilanggar oleh proses divestasi 51%.

Pertanyaan saya dengan PT Vale, dari keempat dasarnya ini kok kamu bisa tidak tunduk, tidak taat dan tidak patuh pada perintah undang-undang, bagaimana sih caranya, coba kamu jelasin?

Silakan Pak Dirut, proses dari awal negosiasi sampai ada yang cawe-cawe jelasin.

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Izin Pak Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan juga Anggota, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Izin menanggapi, mohon maaf kami Wadirut dan juga Direktur Keuangan, wakil daripada dirut yang tidak bisa hadir hari ini. Mungkin langsung mencoba menanggapi Pak Gunhar ya, yang kami lakukan tentunya adalah menjalankan hal-hal yang sudah menjadi mandat kami sesuai arahan daripada pimpinan dan pemegang saham. Yang kami dapatkan hasil akhir adalah memang hasil daripada negosiasi daripada.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Yang perlu kamu jelasin Pak, negosiasinya seperti apa bisa ujug-ujug kasih Mind-ID 34%. Bagaimana proses negosiasinya, apakah Bapak ketemu Si Fulan. Terus si Fulan bilang udah kita atur nanti atau Bapak ketemu Si Fulan, Bapak menjanjikan 20% saham publik diberikan kepada Si Fulan. Sehingga Si Fulan mengatasnamakan Republik Indonesia juga mendapat saham 20% itu, dijelasin dong biar masyarakat tahu dan publik juga mendengar langsung bahwa kegagalan pemerintah mendivestasikan saham 51% PT Vale itu ada Si Fulan, ada Si Fulan, ada Si Fulan yang ikut berinvestasi.

Itu yang saya mau dengar dari Bapak, *kan nggak* mungkin tiba-tiba, ujug-ujug langsung *bleng*, *kan* ada proses. Ada rapat lah, ada tim lah, apa yang dibicarakan di situ, apa yang dibahas di situ karena kita sudah tadi saya sampaikan secara konstruksi legalnya udah selesai, *nggak* ada lagi yang cawe-cawe, undang-undang dasar, undang-undang, PP, rapat kementerian dengan DPR, *clear*.

Kok tiba-tiba menjelang akhir jabatan presiden yang tinggal berapa bulan lagi langsung disetujui, tok, selesai. Apa *nggak* bisa ditunggu ya 6 bulan lagi, kita bangga Pak, anak bangsa bisa 51% Freeport. Ini momen *kan* masih 2



tahun lagi, kok buru-buru amat sih, itu yang itu yang menjadi pertanyaan kami. *Nah* sekarang kok bisa Bapak sekarang ceritain ketemu siapa, jumpa siapa, ngobrol apa, apa janji dan pesannya biar publik juga tahu. *Nggak* mungkin Bapak tiba-tiba ya udah kita setuju, kami *nggak* apa-apa 31%.

Pak Menteri ini tugas negara, Pak Dirut Mind-ID tugas negara, kami yang di sini tugas negara, semua tugas negara tapi Bapak bisa merubah ini. Ini yang saya pikir wah luar biasa Vale ini, 7 kali RDP, Raker dengan Menteri ESDM-DPR *nggak* dianggep, tiba-tiba *bluk*, selesai. *Masya Allah*, rasanya sia-sia Pak jadi DPR Pak. Kemarin kita di sini bangga betul 51% Freeport, Bapak jelasin *nggak* usah muter-muter, kapan pertemuannya, di mana, apa yang dibahas, apa yang dijanjikan sehingga Bapak bisa mengambil keputusan udah selesai 34%.

Silakan Pak.

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Terima kasih Pak,

Izin sekali lagi Pak, memang dalam negosiasi kami ini lebih bersifat objek Pak. Jadi sebagai PT Vale Pak, merupakan objek daripada negosiasi antara para pemegang saham begitu Pak. Jadi keputusan itu kami tidak sekali lagi hanya terima aja *gitu* Pak, mungkin kurang lebih seperti itu.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya bukan begitu ceritanya Pak, kalau saya buka di sini *kan* ada tim divestasi dibentuk sama presiden, betul *nggak* saya tanya? Bapak tahu *nggak*, kalau Bapak *nggak* tahu *nggak* usah jawab, *nggak* tahu saya Pak. Tahu *nggak* Bapak? Presiden membentuk tim untuk divestasi saham PT Vale 51%, terdiri dari beberapa Menteri, betul apa *nggak*? Jawab, betul apa *nggak*?

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Betul Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Betul, apa yang dibicarakan di situ?

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Terus terang kami tidak pernah bertemu langsung dengan tim divestasi yang tadi Bapak maksudkan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terus siapa yang ketemu?



WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Jadi mungkin tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan, sebetulnya *kan* kewajiban divestasi ini adalah untuk mengurangi kepemilikan saham asing, meningkatkan kepemilikan saham dalam negeri. *Nah* dalam konteks ini maka yang bernegosiasi bukan PT Vale-nya Pak, tapi Vale Kanada dan Sumitomo bernegosiasi karena mereka adalah pemilik saham asing. Jadi dalam konteks divestasi ini PT Vale ini sebetulnya adalah objek Pak, bukan subjek, bukan pelaku divestasi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya itu *kan* prosesnya harusnya objek, maka saya tanya kepada Bapak *kok* jadi subjek. Saya ngerti yang Bapak maksud, saya *kan* udah jelasin undang-undang dasar, undang-undang, PP, Raker, RDP selesai. Bapak sebagai objek harusnya menunggu keputusan apa yang sudah dilakukan oleh tahapan-tahapan ini, tetapi ternyata tahapan-tahapan ini Pak *nggak* berarti, *nggak* berarti sama sekali tetap pada kemauan PT Vale seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, saham publik 20%, pemerintah dikasih juga jadi 34%. Setelah saham pemerintah digabung dengan punya publik 54%, ini *kan* lucu-lucuan Pak.

Kita nih udah zaman teknologi begini kita tahu siapa yang pemilik publik 20%, siapa, kita ngerti. *Nah* sekarang Bapak harusnya objek *kok* jadi subjek, di mana saya mau dengar timnya itu berapa orang, siapa aja, ketemu di mana, bicaranya apa aja, sehingga dapat keputusan kesepakatan bersama, saya tanya sama Bapak.

Kalau Pak Menteri tugas negara, Pak Dirut Mind-ID tugas negara, kita tugas negara, semua tugas negara. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 untuk negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk negara, PP 51% untuk negara, semua untuk negara, *nggak* ada yang untuk pribadi, tapi *kok* Bapak bisa jadi pemenang di sini. Ini bingung saya, iya Bapak bisa bilang 34% ditambah dengan 20% sama dengan 54%, coba Bapak jelasin gimana prosesnya, tim divestasinya siapa aja, ketemunya di mana, apa yang dibicarakan.

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Seperti tadi yang, mohon maaf Pak Ketua, Pimpinan dan Pak Gunhar tadi yang seperti yang saya sampaikan ya. Sebetulnya *kan* tim divestasi yang disebut sebagai tim divestasi adalah perwakilan atau tim yang dibentuk oleh dari sisi perusahaan ya Pak ya, yang dibentuk oleh para pemegang saham. Dalam hal ini kalau bicara tentang Vale dan Sumitomo mereka mempunyai tim yang memang isinya adalah orang Vale Kanada dan juga Sumitomo Jepang. Kami tidak duduk di dalam tim itu Pak, tidak duduk dalam tim divestasi tersebut.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Kalau Bapak *nggak* bisa jawab, Bapak *nggak* kompeten duduk di sini. Iya *nggak* bisa jawab namanya Bapak itu, harusnya *kan* Bapak bisa jelaskan ke saya bagaimana sih kronologisnya. Pada tanggal 14 Februari kami bertemu tim divestasi, pada tanggal ini kami ketemu, pembahasannya begini, kesimpulan rapatnya ada, ini catatannya. Saya, Pak dengar dulu lihat sini, seperti kami punya dokumentasi 7 kali kami rapat kerja dan RDP dengan Kementerian ESDM, Mind-ID sama Bapak juga membahas ini Pak, 7 kali rapat, ada notulensi rapat.

Nah sekarang *oke* sudah sepakat 34%, minta notulensi rapat kalian mana 34% itu, apa aja yang kalian bicarakan di situ, siapa saja yang hadir dan bertanda tangan di situ, kasih ke kita biar kita bisa *share* ke publik, biar publik tahu. Bapak bicara objek tetapi Bapak sebagai subjek, kalah semua *kok*, undang-undang dasar kalah, undang-undang kalah, PP kalah, hasil Rapat Kerja Menteri ESDM sama DPR juga kalah.

Kemauan PT Vale aja yang diakomodir, nah ini bener apa *nggak*? Kalau Bapak merasa benar, bagi kita informasinya kita mau tahu juga, bagaimana caranya? Nanti ke depan kalau ada mau kontrak karya ke IUPK, eh kamu belajar sama PT Vale itu, PT Vale juara itu, undang-undang dasar bisa ditekek, undang-undang bisa ditekek, kesimpulan rapat RDP dan Raker dengan menteri bisa ditekek, belajar sama Vale, begitu caranya.

Nah sekarang kalau Bapak *nggak* bisa jawab ya udah *nggak* usah jawab, bisa *nggak* jawab? Saya tanya bisa *nggak* jawab.

WADIRUT PT VALE INDONESIA, TBK:

Yang terkait tadi pertanyaan Bapak apa kesepakatan yang dibuat, dimana dan lain sebagainya kami tidak bisa menjawab Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Nah udah *gitu* aja *kan* simple, saya *nggak* marah Pak, memang suara saya besar. Kalau gayanya aja begini, kalau suara saya kecil badan besar lucu ya, *nggak* bisa jawab *kan*.

Nah ini catatan Pimpinan ya *kan*, bahwa PT Vale tidak bisa memberikan penjelasan terkait dengan divestasi saham 34%. Pak saya kasih tahu Pak ya, PT Vale ini hebat Pak, jujur saja lebih hebat dari PT Freeport. Kalau PT Freeport kemarin 51% Pak itu publik *happy* banget, *sure*, apalagi menjelang tahun-tahun politik, periode kedua Bapak Presiden Jokowi, semua tepuk tangan, warga negara Indonesia di luar negeri luar biasa bangga, menyanjungnyanjung dan memuja-muji kepemimpinan Bapak Jokowi.

Ini di akhir jabatan Pak, harusnya ini kado manis Pak 51% buat negara divestasi sahamnya dari PT Vale tapi apa yang terjadi? Belum habis masa jabatan Pak, buru-buru disepakati lagi. Harusnya ini kado pemerintahan baru,



kalau pemerintahan lama *nggak* mampu. Pertanyaan kita 20% punya publik ini siapa pemiliknya, itu Pak. Ya *kan*? Kita kesel aja lihatnya 7 kali rapat *nggak* digubris, apa-apa juga *nggak* digubris, memang super banget Bapak ini. Ada *nggak* waktu itu pimpinan upaya hukum lagi untuk membatalkan ini saya tanya, ada masih. Kita secara resmi aja Komisi VII menggugat kalau memang ada.

Iya, terima kasih Pimpinan.

F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Iya Pak Gunhar.

Ini tadi kita dan juga dari berbagai aspirasi telah muncul ke permukaan, maka kita diskusi tadi dengan Pak Eddy dan Pak Bambang. Mungkin Pak Eddy bisa menjelaskan hal-hal menyangkut tentang divestasi, aksi korporasi karena beliau pernah di korporasi. Hal ini penting supaya memberi gambaran, kalau toh kita tidak tercapai itu di mananya, kenapa dan kemungkinan apa kalau kita masih bisa, bisa sebagaimana tadi disampaikan Pak Gunhar, membatalkan dan sebagainya atau proses untuk menggugat karena faktanya 51% itu tidak bulat *kan* begitu.

Silakan Pak Eddy.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tapi sebelumnya Pak Sartono ada yang ingin disampaikan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Sedikit saja ya Pak ya. Terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin juga menambahkan saja tentang perpanjangan kontrak kerja, saya izin ke Pak Menteri. Perpanjang kontrak kerja KK Vale Indonesia sudah diteken atau belum Pak, perpanjangannya? Sudah ya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Sudah di-*issued* ke Kementerian Investasi karena izin lewat satu pintu, jadi satu pintu dan kita mengurus masalah yang berkaitan dengan teknis pertambangannya KK menjadi IUPK. Tadi telah kami sampaikan aspek-aspek apa saja yang ada di situ supaya ini terpenuhi, juga dimasukkan juga klausul kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh PT Vale, di antaranya divestasi, divestasi yang harus bisa diselesaikan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Berarti ini *kan* ke apa, tadi *kan* lintas ya ke Menteri Investasi ya, Menteri BUMN. Sebetulnya *kan* ada *bargaining* ini sebetulnya dengan perpanjangan *kan* ada berganti saham nih, tapi saya pikir kebijakan tidak mutlak di



Kementerian ESDM ya karena ada beberapa kementerian lainnya. Ini yang harus dipahami oleh khalayak itu semua bahwa apa, terjadinya perpanjangan ini tidak hanya di Kementerian ESDM, tapi juga ada lintas. Ini juga perlu dipahami, tapi kita juga tadi bersepakat kita harus ngotot juga ini ya perintah undang-undang kan 51% saham yang utuh begitu

Nah tugas kita di situ apa dari pihak parlemen nanti akan diperkuat, diperdalam oleh Pak Eddy dan juga perlu dibuka 20% saham itu yang *go public* itu, siapa saja, juga harus disampaikan kepada publik itu, ke umum *gitu*. Ada gratifikasi tidak di situ, apakah terjadi *peng-peng*, penguasa dan juga pengusaha juga perlu diurai itu. Jadi supaya ceto welo welo begitu, tidak nanti yang terdakwa dari Kementerian ESDM *gitu*.

Padahal *kan* begitu apa tadi disampaikan runtutannya begitu *kan*, mekanismenya, rangkaian kerja tentang pengambilan saham ini. Ini yang juga apa dari Komisi VII untuk dapat di dalam rapat kerja dengan kementerian ini untuk mengurai juga, mana saja apa kementerian-kementerian yang juga menjadi kunci didalam apa pengambilan divestasi ini.

Begitu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf Pak Nasril bukan Pak Nasir, itu saking rindunya sama Pak Nasir makanya salah sebut.

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih.

Pak Ketua dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Menteri, Pak Dirut Mind-ID dan segenap jajaran PT Vale.

Saya hanya melihat, pemandangan bahwa dalam divestasi PT Vale ini adalah kelemahan. Apakah ini sebuah kelemahan atau kita memang sadar akan, sadar akan tentang korporasi. Kita kan bukan seperti negara-negara Venezuela dan sebagai, ini tanahku, Aku yang punya, ini negeriku Aku yang punya, ini kekuasaanku Aku yang berkuasa. Jadi semangat ini sebenarnya yang terbangun di Komisi VII Pak Menteri, kalau PT Vale ini telah menjadi sebuah perusahaan Tbk di tahun, tahun berapa nih Pak? Tahun 1990, jadi memang pada posisi kepemilikan saham kita 20% dan kita diberikan divestasi 14%, semangat yang kita bangun ini sebenarnya yang *nggak* dibawa keluar.

Ini tanahku, ini negeriku, ini yang *nggak* dibangun, seakan-akan kita sudah ya, kalau memang sudah Tbk kita ikutlah aturan dan peraturan. Ini yang ada kekecewaan dari teman-teman komisi, apalagi disinyalir dari yang 11,48%

ini adalah kepemilikannya adalah Sumitomo yang berafiliasi juga kepada Kanada, yang saham publik juga 20% ini juga berafiliasi juga dengan PT Vale.

Jadi ya kita ini seakan-akan terbodohi dan dibodoh-bodohi begitulah Pak, ini yang dirasakan oleh teman-teman semua, termasuk saya juga merasakan hal itu. Apakah kita sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk melebihi daripada 34%, saya rasa bisa karena perpanjangan antara kontrak karya menjadi IUPK itu adalah salah satu negosiasi yang ya saya pikir inilah Indonesia begitu Pak, hanya itu.

Kalau memang kita berani tetapi kita *nggak* berani karena ada 3 ini saya lihat, 3 kementerian dan dimaksud juga Marinves yang ini entah kemana berkoordinasinya, *nggak* ngerti ini Pak. Ada Menteri ESDM, ada Menteri BUMN, ada Menteri Investasi, ada Menko Marinves ini siapa dan ada presiden.

Ini siapa yang menjadi *leader*-nya di sini, saya pikir *nggak* mungkin Pak Menteri, Menteri ESDM sebagai *leader*-nya, sebagai negosiator dan dalam hal ini pun saya juga tidak yakin Erick Thohir sebagai negosiator ulung di situ. Kami ingin tahu siapa negosiasinya ini, Bahlil, mungkin juga tidak, Pak Hendi, saya pikir juga tidak sebagai negosiator di situ ini.

Jadi kami ingin tahu negosiatornya ini, kami ingin tahu negosiatornya, sedikit ada tangan besinya Pak, kenapa? Ada IUPK di situ. IUPK inilah sesungguhnya yang kita berharap dari Komisi VII karena tanpa 51% atau pun tanpa di atas 34 ya IUPK tidak diberikan. *Nah* itu kita mau sesungguhnya, ya sedikit agak inilah agak menunjukkan kekuasaan kita tapi ini yang *nggak* terjadi kami melihat, karena ini sesuai dengan prinsip korporasi saya melihat pada saat PT Vale sudah menjadi sebuah perusahaan Tbk ya kita ikuti aturan.

Ini hanya kasihan PT Vale aja memberikan 14% ke kita dan keterbodohan kita juga, karena keterbodohan kita karena ada 11,48 di Sumitomo dan ada saham publik yang notabene tanda kutip ya masih saham usaha karyawan, saham ini yang berafiliasi juga kepada PT Vale.

Nah ini yang sesungguhnya yang kami secara melihat pada posisi divestasi ini kita lemah, kita lemah tidak sekuat pada saat divestasi di Freeport. Catatan-catatan ini sesungguhnya yang tidak berdaya kita dengan PT Vale ini.

Kedua, ada pertanyaannya Pak, ini penambahan dari *independent*, *independent* terhadap Board of Director Pak, dari 2 ke 3. Kenapa yang apanya, kenapa lebih ini Pak, lebih di *independent* ditambahkan, dengan siapa saya bertanya, Pak Indira bisa ya Pak? Kenapa *nggak* Mind-ID ditambahkan 3 begitu loh, kenapa *independent*-nya yang menjadi 3 Board of Director-nya.

DIRUT MIND-ID (HENDI PRIO SANTOSO):

Kami juga merupakan objek Pak Nasril, jadi kami hanya pelaksana keputusan yang diambil oleh tim divestasi. Jadi bahasan mengenai komposisi dan lain-lain itu adalah ketetapan yang sudah diambil oleh tim divestasi.



F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Jadi CEO-nya siapa Pak, kita *kan*?

DIRUT MIND-ID (HENDI PRIO SANTOSO):

CEO-nya haknya nanti untuk mengusulkan dari kita Pak, dari wakil dari Mind-ID.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bukan dirut ya Pak ya?

DIRUT MIND-ID (HENDI PRIO SANTOSO):

Sama Pak, dirut atau CEO.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Di sini *kan* catatan di sini dapat CEO-nya satu.

DIRUT MIND-ID (HENDI PRIO SANTOSO):

Iya sama direktur yang membawahi SDM, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

SDM, iya saya pikir ini Pak Hendi dan Pak Menteri ya saya pikir ini juga *nggak* bisa kita bahas tuntas hari ini, ini *kan* begitu karena kita melihat beberapa komposisi buat Board of Director-nya dan juga komisaris dari mana, apakah ini titipan-titipan yang dari mana, model seperti apa.

Ini yang udahlah kita kecewa terhadap pola ya yang, ini kita di pola Pak, bukan kita yang bikin pola ini, bukan RI yang mempola PT Vale, tapi PT Vale yang mempola kita karena sudah terlanjur ini merupakan perusahaan Tbk yang kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya belas kasihan dari 11 menjadi 14%, hanya itu kami melihat.

Itu respon kami Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Nasril.

Izin saya nyambung dari apa yang disampaikan Pak Nasril, pertama begini saya ingin mendudukan permasalahan ini ke dalam proporsinya supaya kita bisa melihatnya secara lebih jernih. Saya menghargai, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman di Komisi VII sebagai pandangan mereka.

Jadi izinkan saya juga ingin menyampaikan pandangan saya yang mungkin salah, saya juga siap dikoreksi.

Pertama kita melihat bahwa ada saham publik (*suara tidak ada 1.37.05-1.37.16*) artinya pemerintah menyetujui IPO tersebut 20%, ketika saham sudah dijual ke publik itu seperti masuk ke rimba, kita *nggak* tahu siapa yang beli. Bisa yang beli itu si A, si B public, bisa juga pihak-pihak yang terkait, bisa sangat bisa. *Nah* sehingga kalau memang kita ingin mengetahui isi perut yang 20% itu ya kita harus mengetahui, memahami siapa apa *ultimate beneficial owner* dari 20% itu. *Nah* kalau memang ternyata terafiliasi dengan pemegang saham *existing*, ya tentu pemegang saham *existing* harus divestasi karena artinya kita masih belum 51%, meskipun secara legal. Meskipun secara legal yang 20% itu sudah kesepakatannya adalah publik, sehingga itu adalah bagian dari kepemilikan RI itu.

Nah ini apa namanya pertimbangan saya pertama, sehingga dalam hal ini kalau kita memang melihat bahwa ternyata itu IPO-nya adalah apa terafiliasi ya silakan Pak Hendi boleh membeli lebih besar lagi untuk melengkapi 51% itu, meskipun nanti akan perdebatan ya karena yang 20% itu sudah dianggap saham publik yang notabene adalah saham RI.

Kedua, jika saham publik ini sebenarnya dimiliki oleh publik ya, betul-betul publik rata. Mind-ID silakan saja bernegosiasi *b to b* dengan Vale Kanada beli lebih lanjut lagi ya, kalau Kanada mau jual ya silakan aja dijual tapi kalau itu terjadi saya kira kita harus lihat 2 aspek.

Aspek kemampuan, kemampuan apa? Kemampuan pengelolaan, kemampuan pendanaan karena *kan* kita lihat sekarang Mind-ID yang ada di atas mejanya juga sudah cukup banyak gitu ya banyak yang dikelola, rentang kendalinya juga mungkin juga sangat luas sekarang ini. Termasuk juga pendanaannya saya kira untuk menambah, kalau kita hari ini melihat 34% mau nambah 17% lagi itu *kan* mungkin juga uangnya tidak sedikit.

Nah ini yang juga harus jadi pertimbangan, saya kira itu apa bagian dari pandangan saya tetapi bagi saya yang lebih penting lagi sesungguhnya Pak dan ini mungkin juga silakan, tapi ini *b to b discussion* ya saya bukan menjadi apa namanya tidak mau mengarahkan, yang lebih penting bagi saya itu adalah pengelolaan operasional hari ini di Mind-ID, di Vale. Mind-ID hari ini boleh menominasikan Dirut, boleh menominasikan Direktur SDM ya Pak Hendi, tetapi masih belum bisa menominasikan Direktur Keuangan, Direktur Produksi.

Saya *nggak* tahu apakah SDM umum itu termasuk di dalamnya menjadi satu atau terpisah, Direktur Procurement. Itu saya kira fungsi-fungsi yang bisa dipegang oleh anak bangsa kita dan ini saya kira mungkin saat ini kepentingannya agak lebih *urgent* di sana, tetapi untuk yang lainnya saya serahkan ini *kan b to b discussion* ya silakan saja dan ini kemampuan pendanaan, kemampuan pengelolaan itu adalah domainnya Mind-ID untuk kemudian dibahas dengan pemegang sahamnya, siapa? Ya Menteri BUMN gitu.

Ini yang mungkin pandangan dari saya tetapi meskipun saya mengatakan hal tersebut, saya mendukung sepenuhnya bahwa pengelolaan dan kepemilikan dari PT Vale Indonesia itu berada di tangan Indonesia mayoritasnya, tetapi kita harus lihat juga aturan-aturannya supaya kita juga tidak dalam proses untuk melakukan apa akuisisi kepemilikan itu kita melanggar. Itu yang mungkin juga apa perlu penekanan di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

Saya kira kalau tidak ada yang bertanya mungkin ada yang bisa di ini, mau dijawab.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Menambahkan saja.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Saya juga menambahkan Pimpinan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Jadi mungkin lebih yang salah satu selain saham tadi, juga hal yang krusial yang jadi PR besar bagi pemerintah adalah menetapkan peta jalan perhiliran nikel ini. Memastikan nilai tambahnya itu masuk ke kas negara, ini juga apa harus menjadi suatu catatan gitu. Ini kan pasti terjadi ini nih tentang saham ya tapi ini juga penting juga ini peta jalan untuk hilirisasi Pak Menteri.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Ini saya ingin tanya kepada Pak Menteri ESDM ini terkait dengan perpanjangan kontrak karya berubah menjadi IUPK ini. Ini kalau boleh saya tahu Pak Menteri prosesnya seperti apa dan tahapannya bagaimana, kementerian-kementerian apa aja yang ikut memberikan masukan untuk draf perpanjangan ini sampai mana sekarang prosesnya? Karena kami yang duduk di sini Pak, amanah konstitusi, kami taat dan patuh pada konstitusi dalam Undang-Undang MD3 juga Pasal 162 itu "setiap kesepakatan, kesimpulan harus wajib dilaksanakan.

Pelanggaran terhadap kewajiban dikenakan 2 sanksi, satu sanksi administrasi, satunya lagi sanksi denda". Kalau sanksi administrasi berarti



semua kesepakatan, semua keputusan di luar dari ruangan ini ya kita anggap itu tidak memiliki legalitas, itu Undang-Undang MD3 bunyinya, Pak.

Mungkin Pak Menteri bisa juga menjelaskan dan bagaimana dengan kesepakatan-kesepakatan dengan proyek-proyek yang sudah bekerja selama ini, kalau seandainya ini sudah disepakati, *oke* diperpanjang. Terus yang ini pekerjaan ini, ini apa berhenti, apa terus berjalan *gitu, kan* panjang lagi persoalannya dan walaupun memang ada upaya untuk membatalkan perjanjian ini apa yang kita lakukan untuk bangsa dan negara ini sehingga tercapai 51% itu tadi.

Kalau saya mungkin agak berbeda pandangan dengan Pak Eddy soal kemampuan finansial maupun operasional. Saya yakin untuk mengoperasionalkannya anak-anak bangsa ini sudah cukup mampu dan siap ya, tapi kalau memang finansial kita mungkin agak berat tetapi kenapa kalau kita bisa mengakuisisi Freeport 51% kok Vale kita malah *nggak* bisa. Kalau kita bisa, pasti kita bisa *gitu*.

Terima kasih Pak Menteri.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, kami persilakan Pak Menteri untuk bisa memberikan tanggapan nanti setelah itu silakan apa dari Vale atau Mind-ID juga bisa menyambung.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati.

Terkait tadi dengan pertanyaan dari beda antara Vale dengan Freeport ya, jadi kalau di Freeport ini kepemilikan Freeport ini saat ini 48,76%, Mind-ID 26,23%, sisanya Indonesia Papua Metal Mineral 5%, ini komposisi saham yang ada saat ini. Manajemennya juga demikian jadi memang *nominated* CEO-nya itu berasal dari Mind-ID ya, jadi Chief Executive Officer-nya juga dari Mind-ID begitu Bu Paramita.

Jadi kemudian yang perpanjangan ini Vale ini sampai 2035 dan memang bisa diperpanjang 10 tahun lagi, nanti pada saat perpanjangan akan ada proses lanjutan. Kemudian juga tadi telah disampaikan tadi dengan pertanyaan Pak Gunhar tadi, seperti saya kami sampaikan pada saat penjelasan awal. Jadi pada rapat terakhir kabinet November 2023 memang.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Izin, izin Pak, agak keras sedikit Pak.

Rapat terakhir kapan Pak?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

November 2023 Rapat Kabinet itu diperlukan memang langkah-langkah percepatan proses penyelesaian IUPK. Terkait dengan pertanyaan Vale ini, itu sudah ada rencana investasi yang telah saya sampaikan tadi sebesar 11,2 miliar dolar dan ada rencana investasi dari Volkswagen dan juga dengan Ford ya.

Selama ini memang nikel Indonesia ini didominasi oleh satu negara, yang mana ini untuk keseimbangan memang dibuka untuk negara lain sehingga tidak monopolis setelah istilahnya ya. Jadi inilah keseimbangan yang dilakukan dan karena nilai tambahnya ini sangat tinggi untuk proses maka itulah menjadi salah satu dasar pertimbangan karena nilai investasi 11,2 miliar dolar sampai tahun 2029 itu adalah nilai investasi yang sangat besar. Itu yang menjadi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Itu salah satu pertimbangannya Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya pertimbangan utama.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Soal investasi tadi.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Soal divestasi sesuai dengan kondisi yang sudah ada ya di mana saat ini adalah kepemilikannya publik itu disampaikan tuh 20% sudah ada sejak tahun 1990. Maka sebenarnya Vale itu wajib *men-device* lagi 11%, kemudian terjadilah negosiasi untuk ditambah jadilah 14%. Sehingga dengan 14% itu Mind-ID menjadi 34, Vale menjadi 33,8. Jadi 2 party itu menurunkan nilai apa kepemilikan sahamnya yang 11, sebesar 14% untuk di *take over* oleh Mind-ID.

Nah kondisi inilah yang memang kita minta supaya disepakati dulu sebelum IUPK ini keluar, sebelum kita *nah* IUPK sendiri itu hanya aspek-aspek yang tadi telah saya sampaikan. Bahwa aspek-aspek yang kita evaluasi adalah masalah administrasi, teknis, lingkungan finansial dan kinerja perusahaan. Jadi itu yang menjadi basis, sesudah disepakati divestasi, kemudian juga klausul-klausul terkait dengan artikel anggaran komposisi pengendali itu disepakati

antara dua *party*, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi dengan Vale Canada.

Jadi proses itu yang, mungkin nanti jelasnya kami akan lengkapi dalam.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya, dari penjelasan, izin Pimpinan, Pimpinan izin Pimpinan langsung interaktif dengan Pak Menteri.

Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi pada poin 2 halaman ke-12 Pak ya *kan* terkait proses penerbitan SK IUPK PT Vale Indonesia, Tbk. Menteri ESDM telah menyampaikan draf Surat Keputusan IUPK PT Vale Indonesia, Tbk. kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui Surat Nomor T154, ini *kan* terkait perpanjangan Pak ya IUPK *kan*, dari KK ke IUPK *kan*, bisa Bapak bagi ke kami draf ini? Iya minimal tembusan lah DPR Pak.

Jadi *kan* begini saya ini kembali mengulang Pak, ngerunut legal *standing*-nya ya *kan*, tapi sepakat saya *nggak* berbantah-bantahan dengan Pak Menteri. Artinya ini ada undang-undang dasar, ini ada undang-undang, ini ada PP, ini ada hasil rapat keputusan bersama Menteri ESDM dengan DPR, ini ada Undang-Undang MD3 terkait sanksi dan kewajiban yang harus kita patuhi semua *gitu* loh iya *kan*, tetapi kok seperti tadi disampaikan oleh teman kita jadi makin lemah hanya karena nilai investasi.

Oke, *nggak* kita di monopoli *kan* ada rentang waktu Pak masih panjang, ada pemerintahan baru kepresidenan yang baru bisa mengambil kebijakan-kebijakan politik yang strategis ke depan.

Ini yang menjadi pertanyaan kita ini 2, satu ini 20%-nya publik ini publiknya siapa, kedua kok buru-buru amat menjelang akhir jabatan langsung digol-in, diperpanjang ya *kan*. Sementara PR-PR kita yang sebelumnya ini kita berjibaku di ruangan ini kita kunjungan, kita bentuk panja, segala macam sepertinya sia-sia aja Pak ya *kan*, sia-sia aja dan *nggak* ada hasil. Toh tetap kemauannya PT Vale seperti apa yang sudah kita bahas, kita debat selama ini.

Jadi tawaran kita ke mereka tuh lemah, maka saya tanya ke Vale yang pertama, kok bisa kamu hebat betul, juara, semua kamu bisa tekuk-tekuk semua dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh pemerintah ya *kan*, yang kami DPR *nggak* tahu *juntrungan*-nya apa ya *kan*.

Kami menjalankan amanat konstitusi, Pak Menteri menjalankan amanat konstitusi, presiden menjalankan amanat konstitusi, semua amanat konstitusi, tetapi amanat konstitusi, *gronslag*, dasarnya undang-undang tidak kita patuhi. *Nah* ini yang jadi pertimbangan saya, ada apa ini kok bisa, ada bentuk tim divestasi terdiri dari beberapa Menteri, apa aja yang dibicarakan oleh menteri ini, ngomong apa aja dia seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, salah satunya terkait investasi.

Oke, Pak Menteri ESDM bilang begitu, nanti Pak Bahlil juga, oh ini mendesak penting. Pak Marco apa Menteri Menko Marves juga bilang oh ini begini. *Nah* ini harusnya *ter-record* dalam notulensi rapat yang kami Anggota DPR dibagi tahu, oh begini situasinya mendesak dan tertekan. Oh, begini kondisinya kita tidak bisa melakukan negosiasi lagi.

Jadi beritanya *nggak* sembarangan, *nggak* serampangan Pak tapi ketika habis selesai pemilihan legislatif kami dikejutkan berita-berita seperti itu, ya kaget lah, kok bisa, malah DPR *nggak* dibagi tahu. Saya tanya ke Pimpinan, Pimpinan tanda tangan *nggak* itu? *Nggak* ada, Pimpinan dibagi tahu *nggak*? Ya *nggak* ada, *nggak* perlu rapat sama DPR, kalau memang *nggak* dianggap, langsung aja jalan sendiri, *nggak* perlu stempel DPR. Iya puasa, tahu lah, saya suaranya aja gede hatinya lembut, begitulah Pak Menteri iya *kan*.

Kita ini mis-informasi dari kementerian, dari Mind-ID, kita *nggak* tahu sama sekali, ujug-ujug udah putus, udah diterima 34%. Bahkan ada terdengar ada tim lagi yang udah dibentuk iya *kan*, ya ngapain juga kita rapat udah 7 kali. Itu konstitusi loh Pak, seperti yang disampaikan Pak Bambang Haryadi tadi, pelanggaran terhadap kesimpulan kesepakatan bersama itu melanggar undang-undang, undang-undang mana? Undang-Undang MD3.

Pelanggaran Undang-Undang MD3 itu ada 2 sanksi, sanksi administrasi sama denda. Belum lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023, 2020, ada PP juga iya *kan*, apa, mau apa kita di ruangan ini, kalah kok faktanya. DPR 50 orang Anggota Komisi VII, lewat iya *kan*, Mind-ID sebagai BUMN yang kita dorong-dorong, lewat, sampai Pak Menteri pun juga punya semangat untuk divestasi 51% lewat juga, kalah.

Faktanya hari ini kita kalah, kalah sebagai bangsa, faktanya kita kalah Pak sebagai bangsa, *nggak* ada yang kita bisa banggain di sini. Siapa yang bikin kebijakan? Ya kita-kita, mungkin Pak Menteri terlibat, mungkin Pak Menteri Investasi terlibat, mungkin Pak Menko Investasi terlibat, Menteri BUMN terlibat. Sama yang dipikirkan tadi pertanyaannya kawan-kawan, apa *nggak* mikir Bapak?

Ini untuk kita loh, anak cucu kita loh begitu. Saya bukan sok-sok nasionalis ya Pak ya, tapi miris saja rasanya 7 kali rapat, Undang-Undang Dasar ada, undang-undang ada, kok bisa ditekuk-tekuk sama Vale ini. Gimana caranya Vale, saya tanya *nggak* bisa jawab dia.

Kamu juga tolong ini Pimpinan, melalui Pimpinan ya, kamu coba nanti berikan laporan kepada saya tahapan rapatnya seperti apa ya, PT Vale dengan siapa, ketemu di mana, apa kesimpulan rapatnya, apa bunyi rapatnya. Tolong disampaikan Pimpinan dijawab secara tertulis.

Saya pengen baca siapa aja yang hadir di situ, apa yang dibacakan di situ. Dibicarakan di situ apa aja, kesimpulannya bagaimana, kapan, di mana. Kalau ada indikasi pelanggaran undang-undang saya akan laporkan, saya akan laporkan Pak. Saya sendiri yang melaporkan, *nggak* perlu angket, *nggak* perlu panja, saya sendiri laporkan. Saya minta jawabannya tertulis.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Iya, Pak Gunhar jadi beberapa hal udah kita kemukakan, memang yang intinya sebagaimana kita kemukakan berkali-kali tentang transparansi yang karena, tapi sebagaimana juga disampaikan bahwa pemerintah Indonesia memang waktu itu tidak mengambil jalan untuk mengambil itu sebagai saham yang atau mitra strategis atau apalah namanya, tapi dilepas ke publik lantas menjadi *quote and unquote* bola liar 20% itu yang hari-hari ini lantas menjadi pertanyaan publik. Apakah dengan divestasi yang kemarin 14% plus yang beberapa waktu lalu 20%, maka Mind-ID yang 34% itu betul-betul mencerminkan atau sebagaimana dalam konstitusi kita menjadi 51%.

Nah inilah ruang-ruang yang menjadi pertanyaan masyarakat termasuk Anggota DPR RI yang tadi disampaikan dengan berbagai argumennya. Kalau masih ada lagi atau kalau mau dianggap cukup, kita mau membacakan kesimpulan rapat karena betapapun kita sama-sama ini menjelang buka puasa, udah pukul 17.00 bukan berarti tidak penting ini tapi.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, kalau menurut saya *nggak* perlu lagi dibikin kesimpulan rapat Pimpinan, udah 7 kali kita bikin kesimpulan rapat, kok *nggak* juga dipatuhi kesimpulan rapatnya. Kau pikir rapat ini hanya dengan catatan, tidak perlu membikin kesimpulan kesepakatan atau apapun bentuknya cukup dengan catatan. Pada hari ini rapat ini catatannya begini.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Iya tetapi *kan* perintah MD3 juga menyatakan “setiap rapat RDP maupun rapat kerja harus dengan kesimpulan”.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Betul, tetapi ada sanksinya jika kewajiban itu tidak dipenuhi maka pelanggaran undang-undang, tapi kalau tidak memenuhi hasil kesepakatan kita juga kita mau ngapain. Jadi lebih baik bikin catatan aja.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Tapi kita melanggar kalau, kita melanggar MD3 kalau tidak melaksanakan ketentuan itu karena memang harus ada kesimpulan rapat. Bukan, ya bukan tapi memang itulah apa *flow of*, bukan *flow of* ya, bahwa segala sesuatu harus dari rapat baik RDP maupun rapat kerja harus diakhiri dengan kesimpulan rapat. Bahwa kesimpulan rapat dilaksanakan, tidak dilaksanakan adalah peristiwa atau hal lain nanti di kemudian berikutnya tentu ada proses-proses selanjutnya.

Demikian Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih ini semuanya apa ungkapan-ungkapan, ekspresi Anggota Dewan yang demikian rupa ini hanya saja mencerminkan kecintaan kita semuanya kepada republik ini. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saya kira yang hadir di sini semuanya sama, hanya saja dalam implementasinya memang kadang-kadang menimbulkan interpretasi-interpretasi yang berbeda karena ada berbagai sudut pandang yang dalam konteks ruang dan waktu bisa dimaknai berbeda. *Nah* inilah mudah-mudahan terus dengan ini mengingatkan kita semuanya untuk terus-menerus ada di apa komitmen-komitmen yang sebagaimana dalam konstitusi tadi.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita cermati draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Republik Indonesia, Dirut Mind-ID dan Dirut PT Vale Indonesia, Tbk. Rabu 3 April 2024.

1. Komisi VII DPR RI telah mendengar paparan Menteri ESDM Republik Indonesia terkait optimalisasi *output* cadangan antar Eselon 1 Kementerian ESDM RI dan akan melakukan pendalaman, dan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Begitu Pak Menteri kesimpulan rapatnya? Mungkin ada catatan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya, saran sebaiknya pendalaman ini bisa dilakukan sebelum tanggal 7.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

7 secepatnya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kalau pas tanggal 7 ya kita udah masuk ke mekanisme yang sebagaimana jadi aturan.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Ya, saran kita terima, jadi itulah kesimpulannya bahwa ini akan dilakukan menjadi catatan ya, catatan di bawah, tenang Pak. Dengan catatan bahwa pendalaman itu dilakukan sebelum tanggal 7, begitu Bapak-Ibu sekalian?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk dapat memastikan adanya nilai tambah setelah dilaksanakannya divestasi sama PT Vale Indonesia, Tbk. termasuk dengan menyusun peta jalan hilirisasi nikel di Indonesia.

Setuju ya Pak Menteri?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut Mind-ID untuk dapat melakukan upaya-upaya kepemilikan saham PT Vale Indonesia, Tbk.

Begitu Pak apa dari Mind-ID apa atau cukup di 34, Pak Hendy, kok senyum-senyum. Oke, setuju nih, kita mendukung nih.

Komisi VII DPR RI mendukung Dirut Mind-ID untuk dapat melakukan upaya-upaya meningkatkan kepemilikan saham PT Vale Indonesia, Tbk. Setuju dengan ini atau tidak perlu, setuju.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI, Dirut Mind-ID dan Dirut PT Vale Indonesia, Tbk. untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 18 April 2024.

Setuju Pak Menteri ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Kita bersyukur bahwa Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Republik Indonesia, Dirut Mind-ID dan Dirut PT Vale Indonesia telah berjalan dengan baik, dengan dinamika, dengan seluruh ekspresi kita sebagai anak bangsa yang *insya* Allah menuju yang terbaik.

Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, rapat kita akhiri dan sebelum kita tutup kita persilahkan Pak Menteri untuk menyampaikan semacam *closing statement* kalau memang ada catatan-catatan.

Dipersilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang telah melakukan pembahasan terkait optimalisasi *output* cadangan antar unit Eselon 1 Kementerian ESDM, kemudian perpanjangan kontrak karya Vale Indonesia yang menjadi izin usaha pertambangan khusus dan kami akan memperhatikan seluruh masukan dari Ibu-Bapak sekalian yang akan kami cermati dan tindak lanjut agar seluruh permasalahan yang dibahas dapat kita selesaikan dengan baik.

Selain itu pertanyaan Ibu-Bapak sekalian akan kami siapkan jawabannya secara tertulis untuk bisa lebih komprehensifnya, yang akan kami sampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Terima kasih.

*Billahittaufig wal hidayah,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian dengan puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, maka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Republik Indonesia, Dirut Mind-ID dan Dirut PT Vale Indonesia saya nyatakan ditutup.

*Billahittaufig walhidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.07 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

